



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada  
Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan RI  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah  
Jln. Wahidin No. 1  
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah No.....(3), tanggal .....(4), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan .....(5) Tahun Anggaran.....(6) sebesar Rp. ....(7) (.....(8) rupiah).

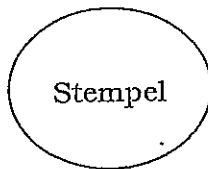
Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .....(9), pada Bank .....(10) dengan Nama Rekening.....(11) No. Rekening: .....(12).

Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- b) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c) ..... (13)

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., tanggal.....(14)  
.....(15)



(16)

.....(17)  
NIP.....(18)

Tembusan Yth:

1. ....(19)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah
(5)	Diisi nama kegiatan hibah
(6)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(9)	Diisi nama pemerintah daerah
(10)	Diisi nama bank tujuan penyaluran hibah
(11)	Diisi nama rekening bank pemerintah daerah
(12)	Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah
(13)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(14)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(15)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(16)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(17)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(18)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(19)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

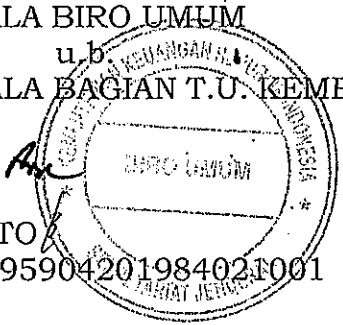
PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH KE REKANAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas lampiran
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah/Perjanjian Penerusan Hibah
(5)	Diisi nama kegiatan hibah
(6)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah
(8)	Diisi terbilang nilai permintaan penyaluran hibah
(9)	Diisi nama penyedia barang/jasa
(10)	Diisi nama bank rekening penyedia barang/jasa
(11)	Diisi nomor rekening penyedia barang/jasa
(12)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penandatanganan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(15)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(16)	Diisi nama (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(17)	Diisi nomor induk pegawai (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(18)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u b  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nama kegiatan hibah
(5)	Diisi nomor Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah
(7)	Diisi tahap penyaluran hibah
(8)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(9)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(15)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

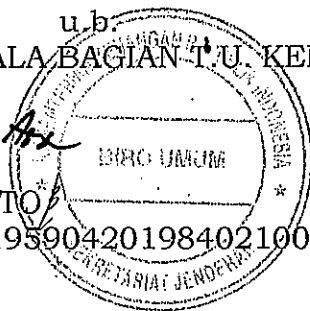
PETUNJUK PENGISIAN  
BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kegiatan hibah
(2)	Diisi tahapan penyaluran hibah
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)
(13)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u. b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

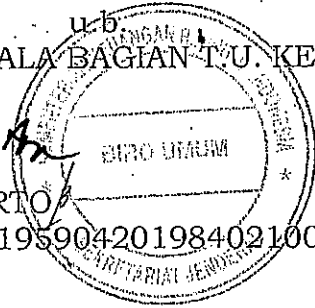
PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kegiatan
(2)	Diisi periode laporan
(3)	Diisi tahun anggaran
(4)	Diisi nomor urut
(5)	Diisi nama kegiatan hibah
(6)	Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan mulai
(7)	Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan selesai
(8)	Diisi total biaya
(9)	Diisi keterangan
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan
(11)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi tanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi nama penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)
(14)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TU. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO